

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Demokrasi Liberal dan Etnisitas

1. Pengertian Demokrasi Liberal

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* artinya rakyat dan *kratos* atau *kratei* yang artinya Pemerintahan. Jadi dapat di artikan Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang artinya pemerintahan di mana rakyat memegang peranan penting.

Demokrasi Liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Demokrasi Liberal pertama kali dikemukakan pada abad pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan Jean- Jacques Rousseau. Semasa perang dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya disbanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.

Demokrasi Liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, dan Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa Republik (Amerika Serikat, India, Perancis, dan lain-lain), atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol, dan lain-lain). Demokrasi Liberal dipakai oleh Negara yang menganut sistem Presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster : Britania raya dan negara-negara persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis).(www.wikipedia.org)

2. Hubungan Demokrasi Liberal dan Etnisitas

Marzena Kisielowska Lipman dalam studinya di Eropa Timur dan Eropa tengah menemukan kesimpulan bahwa telah terjadi kebangkitan etnis. Runtuhnya rezim Komunis Uni Soviet dan perkembangan demokrasi memperluas lingkup kebebasan dan hak warga negara. Terutama kelompok-kelompok agama, kelompok yang bersifat kedaerahan, kelompok kultural, dan kelompok etnis. Demokratisasi membawa konstitusi dan tatanan hukum baru yang menjamin kebebasan politik, agama, dan berbahasa bagi masyarakat di daerah perbatasan. Demokratisasi menyediakan instrumen legal bagi pelaksanaan hak tersebut dan menjadi katalis bagi kebangkitan etnis. Lebih lanjut, demokratisasi membuat inklusi dan partisipasi politik kelompok etnis menjadi lebih besar. Kebangkitan etnik diakomodasi ke dalam gerakan solidaritas untuk kebebasan dan keadilan yang ditunjukkan oleh kelompok etnis minoritas. Kebangkitan etnis juga dilakukan dengan cara

mengembangkan agenda solidaritas etnis, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional (Tabah Maryanah, 2007).

Robert Kaplan dalam buku *The Coming Anarchy* (2000) mengamati apa yang terjadi di Benua Afrika. Dalam observasinya, demokrasi telah gagal menyelamatkan Afrika. Bukan perpolitikan yang rasional yang muncul di benua itu, tetapi pertarungan antarsuku dan antaragama. Demokrasi mengandaikan partai politik yang menjadi *interest aggregation*. Di Afrika, hal itu tidak terjadi. Partai politik ternyata hanya berbasis agama atau kesukuan, dan pertarungan antarpartai menjadi pertarungan antarsuku dan agama. Ketika dilaksanakan pemilu, yang terjadi medan pertempuran berlumur darah dan bukan arena perebutan kekuasaan yang rasional. Kaplan terang-terangan mengatakan, demokrasi tak akan berjalan di negara yang sedang berkembang, yang mempunyai partai politik berbasis suku atau agama. Kedua hal itu tak mungkin diakomodasi dalam sistem demokrasi yang pada dasarnya adalah sistem yang didasarkan atas toleransi (I. Wibowo, 2003).

B. Partai Politik dan Fungsinya

Istilah partai menurut Maurice Duverger dalam Ichlasul Amal seperti dikutip Ari Darmastuti (2004) kata partai digunakan untuk menggambarkan faksi-faksi dalam republik-republik masa lalu, pasukan-pasukan yang terbentuk di sekitar *conditieri* pada masa Renaisans Itali, kelab-kelab tempat berkumpul anggota-anggota dewan-dewan revolusi, komite-komite yang bertugas memenangkan pemilihan umum dan monarki konstitusional, dan organisasi-organisasi sosial yang membentuk

opini publik dalam negara-negara demokrasi modern. Semua lembaga-lembaga tersebut berperan dalam memenangkan kekuasaan politik dan menerapkannya.

George B. De Huszar dan Thomas H. Stevenson dalam Miriam Budiardjo seperti dikutip Ari Darmastuti (2004) mengartikan partai politik sebagai sekelompok orang yang terorganisir untuk ikut serta mengendalikan suatu pemerintahan agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan orang-orangnya dalam jabatan. Pendapat di atas menitikberatkan bahwa partai politik sebagai organisasi yang berorientasi secara langsung kepada penguasaan pemerintahan.

Sigmund Nuemann dalam Miriam Budiardjo seperti dikutip Ari Darmastuti (2004) memberikan makna yang lebih luas lagi, di mana partai politik diartikan sebagai organisasi artikulatif terdiri dari pelaku-pelaku politik yang masih aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda-beda.

Gabriel A. Almond dalam Collin Mc Andrews seperti dikutip Ari Darmastuti (2004) menyatakan bahwa ada tujuh fungsi partai politik yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, artikulasi kepentingan, komunikasi politik, pembuat kebijakan. Di samping ketujuh fungsi di atas Haryanto dalam Ari Darmastuti menambahkan dua fungsi lain yaitu partai politik sebagai sarana pengatur konflik dan mengkritik rezim yang berkuasa atau kontrol politik.

1. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik (*political participation*) merupakan proses pembentukan sikap serta orientasi politik warga negara terhadap sistem politik (Almond dalam Collin Mc Andrews seperti dikutip Ari Darmastuti, 2004). Melalui proses sosialisasi ini para anggota masyarakat memperoleh orientasi dan sikap politik terhadap kehidupan politik yang berlangsung di masyarakat. Berdasarkan sikap dan orientasi politik yang diperoleh dari sosialisasi politik masyarakat akan dapat menenpatkan diri dan mengambil bagian atau tidak mengambil bagian dalam sistem politik.

Sosialisasi politik berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal-non formal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari (Ramlan Surbakti dalam Ari Darmastuti, 2004).

Dari segi metode penyampain pesan, sosialisasi politik menjadi dua, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Sedangkan indoktrinasi merupakan proses sepihak yang dilakukan penguasa dalam memobilisasi dan memanipulasi warga negara untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap baik dan ideal oleh penguasa (Ramlan Surbakti dalam Ari Darmastuti, 2004).

2. Rekrutment Politik

Fungsi rekrutment politik (*political recruitment*) ini berkaitan dengan proses penyeleksian, memilih, mengangkat pejabat politik untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam proses politik maupun menjalankan roda pemerintahan. Fungsi rekrutment merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi ini memiliki peranan sangat penting dalam menjaga kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam (Ramlan Surbakti dalam Ari Darmastuti, 2004).

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik (*political participation*) adalah keikutsertaan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik serta ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Pada dasarnya, ketika partai politik menarik minat dan perhatian warga negara untuk ikut aktif dan bersedia menjadi anggota partai, sesungguhnya partai politik menjadi wahana bagi warga negara untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik (Ari darmastuti, 2004).

4. Komunikasi Politik

Komunikasi politik (*political communication*) adalah proses penyampaian mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Kedudukan partai politik adalah sebagai jembatan penghubung atau komunikator politik. Dari masyarakat partai politik menyalurkan aneka ragam pendapat, aspirasi maupun kepentingan kepada pihak penguasa. Dan dari penguasa, partai politik menyalurkan informasi,

menyebarkan kebijakan pemerintah kepada masyarakat (Haryanto dalam Ari Darmastuti, 2004).

5. Artikulasi kepentingan dan Agregasi kepentingan

Artikulasi kepentingan (*interest articulation*) adalah proses merumuskan dan kemudian menyalurkan berbagai ragam pendapat, aspirasi maupun kepentingan masyarakat tersebut dapat berupa tuntutan maupun dukungan. Ketika partai politik menyalurkan aneka ragam pendapat, aspirasi masyarakat kepada pemerintah maka merupakan proses komunikasi astu arah, dari masyarakat kepada pemerintah (Ari Darmastuti, 2004).

Agregasi atau pemandu kepentingan (*interest aggregation*) merupakan proses penggabungan tuntutan-tuntutan dan dukungan-dukungan yang ada dalam masyarakat menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, untuk diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Di dalam masyarakat, ada berbagai macam tuntutan dan dukungan yang berkembang, baik yang sifatnya sama, berbeda, atau bahkan bertentangan. Partai politik menampung dan memilah-milah tuntutan yang sama, kemudian memadukan dan menganalisis untuk dijadikan berbagai alternatif kebijakan umum. Selanjutnya memperjuangkannya dalam proses pembuatan keputusan untuk menjadi sebuah keputusan (Ari Darmastuti, 2004).

C. Konsep Etnis dan Etnisitas

Kata etnik (*ethnic*) berasal dari kata bahasa Yunani *ethnos*, yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang. Acap kali *ethnos* diartikan sebagai setiap kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat-istiadat, bahasa, nilai dan norma budaya, dan lain-lain yang pada gilirannya mengindikasikan adanya kenyataan kelompok mayoritas dan minoritas dalam suatu masyarakat.

Fredrick Bart dan Zastro dalam Liliweri (2005) mengatakan etnik adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budayanya.

Koentjaraningrat dalam Liliweri (2005) memaksudkan etnik sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut. Adanya komunitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Sementara itu, dalam kaitannya dengan "bangsa", etnik (kelompok etnik) merupakan konsep yang digunakan silih berganti untuk menerangkan suatu bangsa seperti Indonesia, dari sudut pandang kebangsaan yang melatarbelakangi perkembangan budaya (Hidayah dalam Liliweri, 2005).

Martin Bulmer dalam Liliweri (2005) mengemukakan, etnik atau yang selalu disebut kelompok etnik adalah satu kelompok kolektif manusia dalam penduduk yang luas. Memiliki kenyataan atau cerita asal-usul yang sama, mempunyai kenangan terhadap masa lalu, yang terfokus pada satu unsur simbolik atau lebih. Mendefinisikan identitas kelompok, seperti kekerabatan, agama, bahasa,

pembagian wilayah, tampilan nasionalitas dan fisik (suku bangsa dan fisik. Anggotanya sadar bahwa mereka merupakan anggota dari kelompok tersebut.

Diana dalam Liliweri (2005) mengemukakan bahwa etnik, atau yang lazim disebut dengan kelompok etnik, adalah kumpulan orang yang dapat dibedakan terutama oleh karakteristik kebudayaan atau bangsa, yang meliputi :

1. keunikan dalam perangai (*trait*) budaya
2. perasaan sebagai satu komunitas
3. mempunyai perasaan etnosentrisme
4. status keanggotaan yang bersifat keturunan atau *ascribed status*
5. berdiam atau memiliki teritorial tertentu.

Sedangkan Etnisitas (*ethnicity*) adalah konsep yang menjelaskan :

1. status sekelompok orang berdasarkan kebudayaan yang dia warisi dari generasi sebelumnya.
2. nilai budaya dan norma yang membedakan anggota suatu kelompok dengan kelompok lain. Para anggota suatu kelompok etnis umumnya mempunyai kesadaran atas nilai dan norma budaya yang sama, bahkan menjadikannya sebagai identitas budaya untuk membedakan atau memisahkan diri dengan kelompok lain.
3. penggolongan etnik berdasarkan afiliasi, artinya atas dasar apa sekelompok orang berafiliasi satu sama lain. Bahkan itu dijadikan sebagai identitas sekaligus identifikasi dari individu bahwa mereka merupakan bagian dari anggota kelompok etnik.

4. perbedaan dengan ras, bahwa etnisitas merupakan proses pertukaran kebiasaan berperilaku dan kebudayaan secara turun-temurun.
5. identitas kelompok yang didasarkan pada kesamaan karakteristik bahasa, kebudayaan, sejarah, dan asal-usul geografis.
6. pembagian atau pertukaran kebudayaan yang berbasis pada bahasa, agama, dan kebangsaan (nasionalisme). Atas pertimbangan ini etnisitas selalu dihubungkan dengan keyakinan yang berlebihan pada bahasa, agama, dan kebangsaan lain (Liliweri, 2005).

Etnisitas adalah konsep relasional yang mendasarkan pada kategorisasi identifikasi diri (*self identification*) (Barker dalam Kinasih, 2005).

Etnisitas dipaparkan oleh Jan Nederveen Pieterse sebagai bidang yang merujuk pada politik kultural yang dilakukan oleh kelompok dominan Pieterse dalam Kinasih (2005). Etnisitas merupakan kategori-kategori yang diterapkan pada kelompok atau kumpulan orang yang dibentuk dan membentuk dirinya dalam kebersamaan atau kolektivitas (Rex dalam Kinasih, 2005). Dengan demikian etnisitas lebih menunjuk pada kolektivitas dari pada individual. Sementara Paul Brass dalam Pieterse seperti dikutip Kinasih (2005) menyatakan etnisitas adalah kategori etnis mengenai kesadaran kelas ke kelas. Etnisitas merupakan aspek yang penting dalam konteks hubungan antar kelompok. Pada *term* ini muncul gagasan tentang pembedaan atas klaim terhadap dasar asal-usul dan karakteristik budaya. Jika ada pembedaan antara "orang dalam" (*insider*) dan "orang luar" (*outsider*) maka tidak akan ada yang namanya etnisitas (Dwyer dalam Kinasih, 2005).

Erikson dalam Kinasih (2005) menambahkan syarat kemunculan etnisitas atau suatu kelompok etnis adalah bahwa kelompok tersebut paling tidak telah menjalin hubungan atau kontak dengan etnis lain, dan masing-masing harus menerima gagasan ide-ide perbedaan di antara mereka. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka tidak akan muncul diskusi tentang etnisitas, karena pada hakikatnya etnisitas adalah sebuah aspek relasional bukan milik suatu kelompok.

D. Pandangan Etnisitas

Ada beberapa pandangan teoritis utama yang bisa digunakan dalam melihat fenomena etnisitas. Pandangan tersebut adalah :

1. Pandangan Primordialisme

Pandangan ini membaca kelompok etnik sebagai sesuatu yang *given* dari sananya, dan tidak terbantah. Argumentasi kaum primordialis menyatakan bahwa identitas etnis telah terberi sejak manusia itu dilahirkan. Identitas kolektif dibangun melalui proses bersama dalam komunitas, melalui ikatan-ikatan penyejarahan yang sama dan sosialisasi komunitas (Nurul Aini dalam Kinasih, 2005).

Dalam masyarakat modern, primordialisme sering dimanifestasikan dalam tindakan-tindakan yang mengarah pada tribalisme. Secara mendasar, kaum primordialisme merasa pesimis manusia dapat hidup dalam satu kondisi multikultural dan multietnis (Pieterse dalam Kinasih, 2005).

2. Pandangan Konstruktivis

Memandang fenomena etnis sebagai hasil dari proses sosial yang kompleks. Pandangan Konstruktivis melihat identitas etnis terbangun melalui mitologi, sejarah masa lampau, cerita nenek moyang, dan ikatan-ikatan kultural. Manusia menyadari identitasnya secara otomatis. Kelompok etnis menurut pandangan konstruktif bukan semata-mata kategori sosial tetapi merupakan kesadaran kultural (Aini dalam Kinasih, 2005).

3. Pandangan Instrumentalis

Dalam pandangan ini keterikatan dan identitas dalam etnis bukan dipandang sebagai sesuatu yang tetap. Menurut kaum instrumentalis relasi etnis selalu berubah. Mereka bersepakat dengan kaum konstruktivis yang menekankan kesadaran etnis terbangun atas konstruksi sosial. Akan tetapi pandangan instrumentalis lebih menekankan aspek kekuasaan. Kaum instrumentalis memandang kesadaran etnis sebagai hasil manipulasi dan mobilisasi politik elit yang berkuasa. Konstruksi tersebut diproduksi secara terus-menerus melalui atribut-atribut awal etnisitas seperti kebangsaan, agama, ras dan bahasa. Dalam pemahaman sederhana etnis adalah bentukan atau produk wacana politik elit yang berkuasa (Kinasih, 2005).

Dari beberapa pandangan di atas, penulis akan menggunakan pandangan instrumentalis di dalam melakukan penelitian. Hal ini disebabkan di dalam penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk Pilkada Lampung 2008, partai politik akan merekrut calon berdasarkan kriteria-kriteria tertentu,

dalam hal ini etnisitas. Jika calon sudah ditentukan maka partai memiliki kekuasaan untuk memanipulasi rakyat dengan membawa isu etnisitas sebagai sarana untuk memperoleh dukungan suara pada Pilkada.

E. Definisi Konseptual

Untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian, maka dianggap perlu dalam penelitian ini dirumuskan konsep-konsep yang digunakan.

- a. Politik Etnis adalah Politik yang berlandaskan pada nilai-nilai kesukuan, agama, dan kultur masyarakat.
- b. Politisasi Etnis adalah praktek politik yang menjadikan isu etnis sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal Pilkada maka etnis dijadikan alat untuk memperoleh atau meningkatkan dukungan suara dalam Pilkada.
- c. Rekrutment cagub dan cawagub adalah proses seleksi individu-individu berbakat untuk ditempatkan pada jabatan sebagai cagub ataupun cawagub.
- d. Etnis Jawa adalah masyarakat Jawa yang berdasarkan garis keturunan atau biologisnya beradat Jawa, berbahasa daerah Jawa, dan juga masih menerapkan adat-istiadat atau prinsip-prinsip kehidupan masyarakat Jawa.
- e. Etnis Lampung adalah masyarakat Lampung yang berdasarkan garis keturunan atau biologisnya beradat Lampung, berbahasa daerah Lampung, dan juga masih menerapkan adat-istiadat atau prinsip-prinsip kehidupan masyarakat Lampung.